**ARTIKEL**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DENGAN PENCANTUMAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN**

Disusun Oleh :

**Nama : Rendika Noprizaldy**

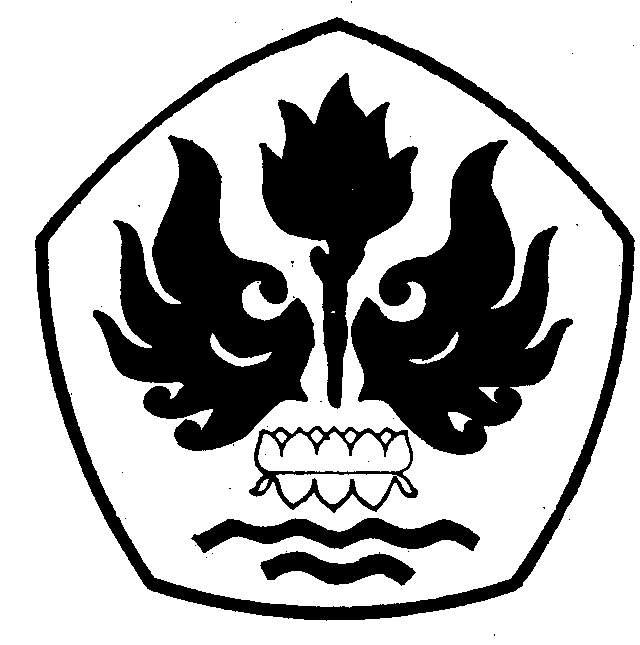
**NPM : 168040006**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.H.**

**Buchari Said, S.H., M.H.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG 2018**

**Abstrak**

Dalam upaya untuk upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Hal inilah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk menulis tesis dengan permasalahan : 1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dan 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan.

***Abstrack***

*In efforts to better ensure legal certainty, fairness, transparency and accountability of public services, to support efforts to improve and develop national economies related to global trade, to support the smooth flow of goods and to increase the effectiveness of control over the traffic of goods entering or leaving the area Indonesian customs and certain goods traffic within Indonesia's customs area, as well as to optimize smuggling prevention and prosecution, it is necessary to have a clearer regulation in customs implementation. This is thebackground of the author's interest to write a thesis with the problem: 1. How to enforce criminal law in order to prevent and eradicate smuggling crime and 2. What factors cause the crime of smuggling.*

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Aldrin Mp Hutabarat, *Meningkatkan Sistem Pengawasan Mobilitas Barang Dan Manusia Daerah Perbatasan Di Tingkat Kod Guna Mewaspadai Zona Perdagangan Bebas Dalam Rangka Harkamtibmas*, Lembang, April 2008.

Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Melton Putra, Jakarta, 1988.

Amir M.S. *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, (Penerbit PT. Pusaka Binaman Pressindo, Cet Ke Enam, Jakarta, 1999.

Anthon F Susanto, *Peneitian hukum, Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, 2015.

Baharudin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

---------- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

---------- *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara,* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang; 1996.

--------- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana,* Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Bambang Prasodjo, “*Domain Publik dari fungsi Kepabeanan dan Postulat Lembaga yang Melaksanakan*”, Warta Bea Cukai, Edisi 413 April 2009.

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, 1968.

Elizabeth A Martin *and* Jonathan *Oxford Dictionary Law,* Six Edition, Oxford University Press., New York : 2006.

George P. Fletcher, *Basic Consepts of Legal Tought,* Oxford University Press : 1996.

Joeniarto, *Negara Hukum, Gadjah Mada*, Yogyakarta.

John Chipman Gray, *The Nature and Sources of the Law*, (United State of America: The Legal Classics Library,1990), hlm. 62.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2004.

Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Penerbit Alumni Bandung, 2003.

M oeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung 1984.

Nyoman Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.

P Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.55.

Peter Mahmud Marzuki, *Peneltian Hukum*, Edisi Pertama Cet Ke 2, Kencana Jakarta, 2006.

Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung, 1977.

Prof. Mr.St. Munadjat Danusaputro, *wawasan susantara : dalam pendidikan dan kebudayaan* (buku III), (Bandung: Penerbit Alumni, 1981).

Purwito M, Ali, *Kepabenanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010.

Refrensi Abintoro Prakoso, *Kriminologi Hukum dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Presfektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, (Bandung: Binacipta, 1996).

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum,* Universitas Indonesia Jakarta 2003 : 2004.

Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Import*, Erlangga, Jakarta, 1997. hlm.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Sunarno, *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor,* Jakarta, 2007.

Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif.* (Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hlm. 71.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Peneltian Hukum*. Cet 3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

---------- *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers Cet. Ke-10, Jakarta, 1983.

---------- *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia.* (UI Press, Jakarta, 1983).

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty.

Sam S. Souryal. *Ethic In Criminal Justice* (*Etika dalam peradilan Pidana, Upaya mencari kebenaran*), Sam Houston State University US, (Penerbit PT. Cipta Manunggal Edisi ke 2; 2005.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum*: *Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, (Alumni, Bandung, 1991).

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* : *Kajian Terhadap Pembangunan Hukum Pidana*, (Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983).

Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan I, II, III, dan IV dalam Satu Naskah, Penerbit Media Presindo Yogyakarta 2004.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2007.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang KUHAP

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-18/BC/2008 tentang Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Sistem National Single Window (NSW) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Emas, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, KKPPBC Belawan dan KPPBC Soekarno Hatta.

1. **Sumber Lain**

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com).

<https://hanauchiha.wordpress.com/2008/09/15/kenapa-penyelundupan-terus-terjadi/>.

America: The Legal Classics Library,1990),

Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan* (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), Yogyakarta, Graha Ilmu.

Singgih Trisulistiyono. *Makalah pada seminar 50 tahun deklarasi Djuanda: Mengembangkan Kesadaran Wawasan Nusantara Bagi Masyarakat Indonesia (Direktorat Geografi Sejarah Dirjen Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata*,Bogor, 13-14 Desember 2007).

Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari ‘kebijakan dari hukum pidana’ (*penal policy*).

Dino.P. Djalal, *The Geopolitics of Indonesia’s Maritime Territorial Policy* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996).

Laporan hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2008.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989.

Setyowasis, *Import Magazine*, Edisi November 2007, No.1318/XXXVII.

Sumadji et al. *Kamus Ekonomi*. Wacana Intelektual pp, Jakarta, 2006.

UiPress. *Perdagangan internasional*.Cetakan Pertama. Penerbit universitas indonesia uiPress. Jakarta, 2014.

Sejarah Bea dan Cukai, www.beacukai. go. id, Diakses Pada 17 Juli 2017 Pukul 01. 00 am.

http://repository. usu. ac. id/bitstream/handle/123456789/56768/Chapter%20I. pdf?sequence=4&isAllowed=y diakses pada tanggal 14 juli pukul 13:00 WIB.

http://tni. mil. id/pages-10-sejarah-tni. html, diakses taggal 22 Agustus 2017 Pukul 09. 00 WIB.

http://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-pe rkuat-armada-patroli-laut.html, diakses tanggal 25 November 2017.